

MEMORI KOLEKTIF DAN PENYANGKALAN: KASUS PERISTIWA SALUMPAGA 1919

COLLECTIVE MEMORY AND DENIAL: THE CASE OF SALUMPAGA 1919

Adi Setiawan

Peneliti Independen

Surel: adislainawa@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini merupakan sebuah eksperimen retrospektif yang mencoba untuk menawarkan sebuah cara untuk memahami kembali kontestasi memori di kalangan masyarakat Tolitoli mengenai peristiwa pemberontakan rakyat Salumpaga yang terjadi pada 1919. Selain membahas proses mengingat dan melupakan, artikel ini juga melangkah lebih jauh dengan menyoroti upaya penyangkalan memori. Artikel ini mengeksplorasi bagaimana dan mengapa elite penguasa Tolitoli menekan ingatan peristiwa Salumpaga sedemikian rupa. Untuk itu, artikel ini secara khusus menyoroti praktik penguasa Tolitoli dalam memperlakukan memori masyarakat lokal yang melekat dalam sejumlah situs memori. Artikel ini berargumen bahwa memori tentang peristiwa Salumpaga 1919 tidak hanya diperebutkan dalam konteks mengingat dan melupakan, tetapi juga melibatkan praktik penyangkalan.

Kata Kunci: *memori; penyangkalan; Tolitoli; Salumpaga*

Abstract

This article presents a retrospective experiment that aims to offer a new understanding of the contestation of memory among the people of Tolitoli regarding the Salumpaga resistance movement, which took place in 1919. In addition to discussing the processes of remembering and forgetting, this article goes further by highlighting the attempts to deny the memory. This article examines how and why the Tolitoli ruling elite suppressed the memory of the Salumpaga incident in this manner. To that end, this article specifically addresses the practices of the Tolitoli authorities in treating the memories of the local community embedded in a number of memory sites. This article argues that the memory of the 1919 Salumpaga incident is not only contested in the context of remembering and forgetting, but also involves practices of denial.

Keywords: *memory; denying; Tolitoli; Salumpaga*

PENGANTAR

Tulisan ini merupakan sebuah eksperimen retrospektif yang menawarkan sebuah cara untuk memahami kembali kontestasi memori mengenai peristiwa pemberontakan rakyat Salumpaga yang terjadi pada tahun 1919 di kalangan masyarakat Tolitoli. Secara historiografis, peristiwa tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu bagian dari periode yang Shiraishi sebut sebagai *An Age in Motion* atau *Zaman Bergerak*, sebuah masa ketika sejumlah organisasi berbasis massa, termasuk Sarekat Islam, turut serta dalam upaya membangun kesadaran politik masyarakat Indonesia mengenai penindasan dan eksploitasi kolonial. Upaya itu dilakukan di sejumlah daerah yang dalam beberapa kasus bermuara pada munculnya radikalisme lokal, termasuk peristiwa yang terjadi di Salumpaga. Beberapa upaya untuk merekonstruksi peristiwa ini secara detail telah dilakukan oleh sejumlah sejarawan, seperti oleh Lukman Nadjamuddin,¹ Juraid Abdul Latief,² dan Oriza Vilosa.³ Selain itu, peristiwa ini juga terekam dalam sejumlah buku *babon* mengenai sejarah Indonesia, terutama yang mengkaji isu di sekitar periode pergerakan nasional, sekalipun nyaris tidak pernah dibicarakan secara luas oleh publik Indonesia. Beberapa buku itu termasuk karya George McTurnan Kahin,⁴ Merle Calvin Ricklefs,⁵ Takashi Shiraishi,⁶ Adrian Vickers,⁷ Ruth Thomas McVey,⁸ hingga Robert van Niel,⁹ yang semuanya mengindikasikan bahwa pemberontakan rakyat Salumpaga pada 5 Juni 1919 merupakan salah satu momen yang memiliki makna penting bagi sejarah pergerakan rakyat Indonesia. Bagi pemerintah kolonial, terbunuhnya seorang pejabat muda mereka, yakni kontrolir berusia 24 tahun J.P. De Kat Angelino,¹⁰ merupakan insiden yang mengejutkan. Hampir bersamaan dengan peristiwa yang terjadi di Garut pada bulan Juli di tahun yang sama, peristiwa Salumpaga turut membuat gerakan Central Sarekat Islam (CSI) dicurigai dan juga

¹ Lukman Nadjamuddin, "Perlawanan Rakyat Salumpaga Terhadap Belanda" (Skripsi, Universitas Tadulako, 1991).

² Juraid Abdul Latief, "Pemberontakan Petani Toli-Toli 1919" (Tesis, Universitas Gadjah Mada, 1996).

³ Oriza Vilosa, "Sarekat Islam Toli-Toli tahun 1916-1919" (Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 2009).

⁴ George McTurnan Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia* (Ithaca: Cornell University Press, 2007), 75.

⁵ Merle Calvin Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008* (Jakarta: Penerbit Serambi, 2008), 375.

⁶ Takashi Shiraishi, *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*, trans. oleh Hilmar Farid (Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2023), 169; Takashi Shiraishi, *Dunia Hantu Digul: Pemolisian sebagai Strategi Politik di Indonesia Masa Kolonial, 1926-1941*, Cetakan pertama, trans. oleh Jafar Suryomenggolo (Yogyakarta: INSISTPress, 2023), 91.

⁷ Adrian Vickers, *A history of modern Indonesia*, Second edition (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), 81.

⁸ Ruth Thomas McVey, *The rise of Indonesian communism*, 1st Equinox ed (Jakarta: Equinox Pub, 2006), 40.

⁹ Robert van Niel, *Munculnya Elit Modern Indonesia* (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 2009), 209.

¹⁰ "het aanzien van nederlands indie," *Leidse Courant*, 2 September 1978, 17.

direpresi oleh pemerintah kolonial. Wakil ketua CSI sekaligus anggota Volksraad, Abdoel Moeis, diseret ke depan pengadilan akibat kedua insiden tersebut.¹¹

Kini, ingatan mengenai peristiwa Salumpaga hidup lestari dalam sejumlah simbol material: nama jalan, alun-alun, museum, buku, organisasi dan yayasan, serta melalui sejumlah aksi kesenian seperti pementasan drama. Satu nama yang dianggap paling mewakili peristiwa itu adalah Haji Hayun, seorang imam yang terlibat dalam insiden itu yang riwayatnya hingga kini masih tak dapat ditelusuri. Di Tolitoli, namanya diabadikan sebagai nama jalan dan alun-alun kota. Namun kontroversi mengenai penamaan monumen-monumen ini mulai muncul pada tahun 2000-an ketika seorang keturunan raja yang terbunuh dalam peristiwa Salumpaga menjadi bagian dari elite penguasa Tolitoli. Dengan otoritas politik yang dimilikinya, ia perlahan-lahan mencoba mereduksi ingatan publik tentang peristiwa itu. Dengan menyebut fenomena ini sebagai “Berebut Sejarah di Tolitoli”, Lumangino¹² juga telah mengendus adanya upaya eksklusi oleh elite Tolitoli terhadap masyarakat Salumpaga dengan membangun citra buruk mengenai masyarakat Salumpaga.

Sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Lumangino, fenomena di atas menunjukkan bahwa ada masalah yang setidaknya menyangkut dua hal, yakni memori di masyarakat Tolitoli secara keseluruhan, dan stigma terhadap masyarakat Salumpaga secara khusus. Selama ini studi mengenai memori masih menyoal tentang proses mengingat (*remembering*), melupakan (*forgetting*), dan kesalahan mengingat (*misremembering*),¹³ sementara praktik penyangkalan (*denying*) cenderung luput dibahas. Penyangkalan di sini tidak hanya terbatas pada ingatan semata, tetapi juga pada nilai-nilai (*values*), makna, atau arti penting yang dari peristiwa di masa lalu yang erat kaitannya dengan konteks politik, budaya, dan sosial yang melatari sebuah masa. Di sisi lain, fenomena ini juga berjaln kelindan dengan pembentukan citra dan identitas, yang mengingatkan pada satu contoh kasus mengenai stigma yang terhadap masyarakat Osing di Banyuwangi.¹⁴ Hubungan antara elite penguasa Tolitoli dan masyarakat Salumpaga dalam menyikapi peristiwa Salumpaga 1919 dalam beberapa waktu terakhir

¹¹ M. Fazil Pamungkas, “Abdoel Moeis, Pembakar Semangat Rakyat Minang,” *Historia.ID*, 10 Agustus 2020, <https://www.historia.id/article/abdoel-moeis-pembakar-semangat-rakyat-minang-p7ebq>.

¹² Wilman Darsono Lumangino, “Berebut Sejarah di Toli-Toli: Ingatan Atas Peristiwa Salumpaga 1919,” *Perkembangan Mutakhir Historiografi Indonesia: Orientasi Tema dan Perspektif*, Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, November 2015, 311–26.

¹³ Lihat, misalnya, Heddy Shri Ahimsa-Putra, “Remembering, Misremembering and Forgetting: The Struggle over ‘Serangan Oemoem 1 Maret 1949’ in Yogyakarta, Indonesia,” *Asian Journal of Social Science* 29, no. 3 (2001): 471–94.

¹⁴ Sri Margana, “Outsiders and Stigma: Reconstruction of Local Identity in Banyuwangi,” dalam *Sites, Bodies and Stories: Imagining Indonesian History*, ed. oleh Susan Legêne, Bambang Purwanto, dan Henk Schulte Nordholt (Singapore: NUS Press, 2015), 218–31, https://www.academia.edu/43370616/Outsiders_and_Stigma_Reconstruction_of_Local_Identity_in_Banyuwangi; Tentang narasi, ingatan, dan identitas sosial, lihat juga Henk Schulte Nordholt, Bambang Purwanto, dan Ratna Saptari, “Memikir ulang historiografi Indonesia,” dalam *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*, ed. oleh Henk Schulte Nordholt, Bambang Purwanto, dan Ratna Saptari (Jakarta; Denpasar: Yayasan Obor Indonesia, KITLV-Jakarta, Pustaka Larasan, 2008), 24–26.

menunjukkan bagaimana citra dan konstruksi identitas berbasis masa lalu dan maknanya di masa kini berkontestasi satu sama lain.

Penting untuk diingat bahwa penyangkalan atas sejarah berbeda dengan penyangkalan atas memori. Penyangkalan sejarah berarti menyangkal bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi di masa lalu, sekalipun bukti-buktinya telah dipaparkan oleh beragam hasil riset yang menyangkut tentangnya. Dengan kata lain, mereka yang menyangkal sejarah berusaha untuk tidak mengakui suatu peristiwa. Pada tingkat yang lebih ekstrem, penyangkalan sejarah bahkan dilakukan dengan cara menghapusnya, baik dengan cara mengintervensi narasi publik maupun melalui penciptaan buku teks, terutama ketika suatu individu atau kelompok berada dalam posisi sebagai pemegang otoritas politik yang memungkinkan mereka untuk menggunakan infrastruktur kekuasaan dalam mengatur narasi sesuai dengan tujuan dan keyakinan mereka. Genosida yang dilakukan oleh Nazi terhadap kaum Yahudi—atau yang dikenal sebagai peristiwa Holocaust, misalnya, pernah disangkal oleh mereka yang menolak untuk memercayai adanya pembunuhan massal terhadap enam juta orang.¹⁵ Contoh lain mengenai hal ini juga baru saja terjadi di Indonesia. Fadli Zon, Menteri Kebudayaan di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, melalui sebuah siaran televisi dengan terang menyangkal peristiwa kekerasan terhadap etnis Tionghoa yang terjadi pada 1998. Ia menampilkan temuan yang dihasilkan dari penelitian yang telah dilakukan, baik oleh akademisi maupun aktivis kemanusiaan, dengan menganggapnya sebagai rumor.¹⁶ Sebagai bagian dari kekuasaan yang juga mensponsori sebuah agenda besar mengenai penulisan sejarah, pernyataan itu memunculkan kecurigaan di kalangan publik bahwa ia hendak menghapus peristiwa itu dalam buku teks yang akan diproduksi.¹⁷

Berbeda dengan menyangkal sejarah, penyangkalan memori tidak menafikan bahwa sebuah peristiwa benar-benar terjadi. Sebaliknya, mereka mengakui terjadinya peristiwa itu, namun menolak untuk mengingat atau bahkan sekadar membicarakannya. Seseorang mungkin tahu mengenai sesuatu, tetapi ia mungkin tidak mampu mengingatnya sebagai sebuah fakta yang mengandung emosi, perasaan, dan fantasi.¹⁸ Satu hal yang umum untuk disangkal adalah memori yang terkait dengan kekerasan. Bagi individu atau kelompok yang mengalaminya, peristiwa kekerasan terasa menyakitkan dan menyisakan luka sehingga dianggap sebagai masa lalu yang pahit dan karena itu, memori tentang kekerasan dapat

¹⁵ Deborah E. Lipstadt, *Denying the Holocaust: The Growing Assault on Truth and Memory*, 1. Plume print, A Plume Book (New York: Plume, 1994); Lihat juga Jason Stanley, *Erasing History: How Fascists Rewrite the Past to Control the Future* (Atria/One Signal Publishers, 2024).

¹⁶ Hayu Rahmitasari, Nurul Fitri Ramadhani, dan Robby Irfany Maqoma, “Fadli Zon menyangkal pemerkosaan massal 1998: Revisi sejarah picu kemarahan publik,” *The Conversation*, 18 Juni 2025, <https://doi.org/10.64628/AAN.ngxfnhdf5>.

¹⁷ BBC Indonesia, “Penulisan ulang sejarah Indonesia – Rawan dijadikan alat legitimasi hingga meminggirkan peran perempuan dan sejarah Papua,” *BBC News Indonesia*, 14 Mei 2025, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1j5l41nlywo>.

¹⁸ Bambang Purwanto, *Gagalnya Historiografi Indonesiasentris?!*, ed. oleh M. Nursam (Yogyakarta: Ombak, 2006), 73–74.

menjadi sebuah momok. Ini membuat mereka enggan untuk mengingatnya lagi karena tidak ada hal baik di dalamnya, baik dengan cara melupakan maupun menyangkalnya.¹⁹

Sebagaimana yang telah dikemukakan di awal, tulisan ini merupakan sebuah eksperimen yang menawarkan cara pembacaan baru mengenai studi memori. Asumsinya adalah bahwa persoalan memori tidak sekadar mengingat dan melupakan, tetapi juga menyangkut soal penyangkalan (*denial*).²⁰ Dari sudut pandang psikologi, tindakan penyangkalan kadang-kadang digunakan sebagai cara yang efektif untuk mengatasi trauma. Tindakan ini kerap dipandang sebagai strategi untuk menghadapi pengalaman yang tidak menyenangkan yang membuat kemungkinan untuk menjangkau memori traumatis menjadi lebih kecil. Itu sebabnya, penyangkalan dan konsekuensi yang menyertainya, dalam beberapa hal, terkait dengan fenomena melupakan. Otgaar dkk. mencatat bahwa tindakan penyangkalan menekan memori yang masuk ke kesadaran, sehingga memori tersebut menjadi kurang mungkin untuk diingat kembali.²¹ Dengan kata lain, usaha untuk menyangkal ingatan atas sebuah peristiwa yang traumatis merupakan cara untuk meredam ingatan yang melekat pada diri mereka, baik secara individual maupun kelompok. Karena itu, sebenarnya penyangkalan tidak berdiri secara terpisah, tetapi juga berhubungan dengan proses melupakan.

Lalu, bagaimana upaya tersebut dilakukan? Mengapa mereka berusaha untuk menyangkal ingatan atas peristiwa Salumpaga? Inilah pertanyaan kunci yang akan didiskusikan dalam artikel ini. Untuk itu, artikel ini menggunakan sejumlah informasi yang dikumpulkan dari beragam sumber, meliputi artikel berita daring sebagai sumber utama untuk menganalisis peristiwa kontemporer, sumber sejarah berupa koran kolonial untuk mencermati konteks historis, serta sejumlah literatur lain yang terkait dengan memori dan peristiwa Salumpaga itu sendiri.

Menyusul bagian pengantar ini, pembahasan dalam artikel ini akan diawali dengan penjelasan ringkas mengenai peristiwa Pemberontakan Rakyat Salumpaga pada 1919. Konteks ini penting untuk memahami latar historis yang membuat cerita dan memori mengenai peristiwa itu dimaknai secara berbeda di kemudian hari. Pada bagian selanjutnya, artikel ini menyoroti upaya mengingat peristiwa itu, mencakup monumen yang dibangun dan dilestarikan, dan juga penciptaan medium lain yang digunakan sebagai sarana untuk mengingat. Pembahasan berikutnya akan

¹⁹ Grace Leksana, "Pendahuluan: Mengapa Mengingat Kekerasan?," dalam *Memori-memori Kekerasan: Ketegangan, Identitas, dan Nasionalisme*, ed. oleh Grace Leksana, Arif Subekti, dan Nanda Meiji (Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2025), 1.

²⁰ Penjelasan mengenai konsep *denying/denial* (dalam bahasa Indonesia berarti *menyangkal/penyangkalan*) berasal dari catatan perkuliahan penulis di kelas "Kapita Selekta Sejarah Indonesia" bersama Prof. Bambang Purwanto, Universitas Gadjah Mada, 15 November 2023.

²¹ Henry Otgaar dkk., "Forgetting having denied: The 'amnesic' consequences of denial," *Memory & Cognition* 46, no. 4 (2018): 520–29, <https://doi.org/10.3758/s13421-017-0781-5>; Henry Otgaar dkk., "The impact of false denials on forgetting and false memory," *Cognition* 202 (September 2020): 104322, <https://doi.org/10.1016/j.cognition.2020.104322>.

menyoroti bagaimana upaya penyangkalan terhadap memori itu tercermin dari sejumlah kebijakan yang diambil oleh penguasa Tolitoli.

PEMBAHASAN

Pemberontakan Rakyat Salumpaga 1919

Salumpaga merupakan salah satu kampung yang terletak di Tolitoli bagian utara. Wilayah ini menjadi beken di Hindia Belanda pada awal dekade kedua abad ke-20 karena seorang kontrolir muda, J.P. De Kat Angelino, terbunuh secara mengenaskan. Insiden tersebut dilatari oleh organisasi Sarekat Islam lokal Tolitoli dan kewajiban kerja paksa (*heerendiensten*). Sarekat Islam Tolitoli telah dibentuk sejak 1916 dan kepengurusannya diresmikan langsung oleh Haji Oemar Said Tjokroaminoto ketika berkunjung ke sana pada bulan April di tahun yang sama. Para elite lokal, termasuk Moggi Haji Ali dan Haji Muhammad Saleh Bantilan, turut bergabung dalam organisasi ini. Bahkan, Moggi Haji Ali sempat diangkat menjadi Presiden SI Tolitoli.

Awalnya, Raja Moggi Haji Ali turut serta dalam menentang *heerendiensten* yang dibebankan kepada masyarakat Tolitoli sejak 1914, berupa pembangunan jalan dari Labuan Dede hingga Kalangkangan. Namun krisis kepercayaan masyarakat terhadap Presiden SI itu mulai menguar ketika Haji Ali akhirnya diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai Raja Tolitoli dan Haji Muhammad Saleh Bantilan sebagai Raja Muda Tolitoli sekaligus Marsaoleh atau kepala distrik Tolitoli Utara pada 1918. Kondisi ini secara langsung memaksa keduanya untuk menjalankan kebijakan pemerintah kolonial yang bertolak belakang dengan aspirasi SI Tolitoli dalam menentang pajak dan kerja paksa.

Pada Mei 1919, Abdoel Moeis, pimpinan Central Sarekat Islam sekaligus anggota Volksraad menjalani serangkaian tur di wilayah Sulawesi bagian utara. Ia tiba di Salumpaga pada 11 Mei dan berkeliling ke sejumlah daerah di Tolitoli. Pada 13 Mei, ia membuka sebuah rapat akbar (*vergadering*) dan menyampaikan pidato terkait gerakan Sarekat Islam yang dilaporkan dihadiri oleh sekitar 2.000 orang.²² Isi pidatonya cukup keras, terutama menyoal kebijakan pemerintah kolonial mengenai pajak (*belasting*) dan kerja paksa (*heerendienst*), dua hal yang dianggap sebagai pemicu pemberontakan yang terjadi di bulan selanjutnya. Para pekerja yang turut mengikuti perkumpulan akbar itu kemudian dianggap mangkir dari pekerjaannya. Bagi pemerintah, tindakan mangkir ini dianggap sebagai hutang kerja dan harus dibayar di kemudian hari. Raja Muda Tolitoli, Mohammad Saleh Bantilan, kemudian menemui rakyat dan memperingatkan mereka untuk kembali bekerja. Jika peringatan ini tidak dihiraukan, maka mereka akan digiring paksa ke tempat kerja. Ultimatum tersebut diabaikan.

²² "Het gebeurde te Toli-Toli.," *De Preanger-bode* (Bandoeng), 12 Agustus 1919, Avond Edisi, 1; "De ware schuldigen," *Deli courant* (Medan), 18 September 1919, Dag Edisi, 2.

Pada 16 Mei 1919, warga di Salumpaga menggelar rapat di sebuah masjid untuk membahas pendirian SI ranting (kring) Salumpaga. Kala itu Maros terpilih menjadi pimpinan SI Salumpaga. Meneruskan pidato Moeis, ia menyampaikan, “saodara-saodara, kita poenja SI sekarang soedah koeat. Sebagai djoega Abdoel Moeis soedah berkata boeroek baiknja ialah jang akan menanggoeng. Kalau perintah bestuur terlaloe keras djanganlah ditoeroet, djangan takoet mati”.²³ Pidato ini mengindikasikan bahwa mereka mengandalkan Abdoel Moeis sebagai anggota Volksraad sebagai jaminan untuk melawan kebijakan kerja paksa. Kabar tentang para pekerja yang mogok serat pembicaraan pada pertemuan ini akhirnya sampai ke telinga kontrolir dan ditafsirkan sebagai upaya melawan pemerintah, sehingga pada 31 Mei 1919, empat orang polisi dari Tolitoli dikirim ke Salumpaga untuk menangkap para pekerja yang dianggap mangkir. Mereka juga akan dijatuhi hukuman berupa penambahan jam kerja mulai 5 Juni.

Rombongan polisi itu tiba di Salumpaga pada 3 Juni 1919. Malam harinya, ketika masyarakat tengah melaksanakan ibadah salat tarawih pertama, polisi merangsek masuk ke dalam masjid untuk membubarkan mereka karena dianggap hendak melaksanakan rapat untuk melawan pemerintah. Esok harinya, ketika mendapati kabar bahwa kontrolir bersama raja dan kepala distrik akan datang ke Salumpaga, masyarakat berkumpul di rumah Haji Hayun untuk membicarakan tentang hukuman dan kerja paksa.²⁴ Pertemuan ini pada intinya hendak mengajukan permohonan kepada kontrolir dan raja agar kewajiban kerja paksa bisa ditunda sehubungan dengan adanya kewajiban puasa. Kontrolir De Kat Angelino bersama rombongannya tiba di Salumpaga pada 5 Juni pagi. Para pekerja telah dikumpulkan untuk diberangkatkan kembali ke tempat kerja sekaligus menjalani hukuman baru. Haji Hayun bersama Otto, Kombong, Hasan, dan Kampaeng lalu menghadap kepada kontrolir De Kat Angelino yang saat itu tengah singgah di sebuah pesanggrahan untuk menyampaikan permohonan mereka. Angelino dan Moggi Haji Ali menolak permohonan itu dan justru memerintahkan para polisi untuk segera menggiring para pekerja berangkat ke tempat kerja.

Sebagaimana tertulis di sejumlah laporan dan buku-buku sejarah, penolakan tersebut berujung pada pemberontakan: Otto menghunuskan parang ke kepala dan leher kontrolir De Kat Angelino serta sebuah tusukan di paha kirinya; Hasan menghajar petugas pajak, Suatan, dengan tusukan di dada kirinya; Kampaeng dan Kombong berhasil mengejar dan membunuh Raja Mogi Haji Ali setelah berupaya melarikan diri; 45 pekerja yang telah dikumpulkan pagi itu juga berhasil bebas setelah sekelompok warga datang merebut senjata para polisi dan membunuh 4 orang polisi serta 1 orang opas. Sementara itu, Haji Muhammad Saleh Bantilan berhasil selamat setelah bersembunyi di salah satu rumah warga. Jasad kontrolir De

²³ Neratja, 7 Februari 1921, dikutip dari Vilosa, “Sarekat Islam Toli-Toli tahun 1916-1919,” 78–79; Rudi Hartono, “Pemberontakan Rakyat Toli-Toli 1919,” *Headlines, Berdikari Online*, 1 Desember 2013, <https://www.berdikarionline.com/pemberontakan-rakyat-toli-toli-1919/>.

²⁴ “Toli-Toli,” *De Preanger-bode* (Bandoeng), 23 Juni 1920, Ochtend Edisi, 1–2.

Kat Angelino beserta 4 orang polisi dan 1 opas dikuburkan di tepi pantai Salumpaga. Sementara itu jenazah Raja Mogi Haji Ali dan Suatan dibawa kembali ke Tolitoli dan dimakamkan di Kampung Nalu.

Bagaimanapun, pemberontakan itu berhasil ditumpas oleh pemerintah kolonial. Sebanyak 120 warga yang diduga terlibat dibawa dan ditahan di Manado, 75 orang di antaranya diperkarakan di Landraad Makassar.²⁵ Beberapa orang divonis bebas. Kombong, Otto, dan Hasan dijatuhi hukuman gantung di Manado; Haji Hayun dikenakan hukuman penjara seumur hidup di Nusakambangan; sementara puluhan lainnya dihukum penjara, mulai dari vonis kurungan selama 2 hingga 20 tahun, sebagian di Boven Digul dan sebagian lagi di Nusakambangan.

Situs-situs Memori

Pada 1922, sebuah tugu untuk menghormati gugurnya kontrolir De Kat Angelino dibangun di Salumpaga. Tugu ini terletak tidak jauh dari tempat terjadinya pemberontakan. Di tugu itu tertulis, "Tanda Peringatan Kepada Almarhoem J P De Kat Angelino Controleur Di Tolitoli Jang Wafat Pada Tang: 5 Juni 1919 Pada Waktos Ia Mendjalan=Kan Kewadjibannja". Di sisi yang lain juga tertulis, "Ter Nagedachtenis Aan J P De Kat Angelino In Leven Controleur Van Tolitoli Die Den 5de Juni 1919 Hier Viel In De Uitoefening Van Zijn Beroep".²⁶

Alih-alih dihancurkan, di masa Indonesia merdeka monumen tersebut justru dipertahankan oleh masyarakat Salumpaga. Namun, fungsi historis tugu tersebut beralih makna: jika pada masa kolonial monumen itu dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mengenang jasa J.P. De Kat Angelino, maka di masa Indonesia merdeka tugu tersebut tetap dipertahankan untuk mengenang heroisme masyarakat Salumpaga dalam melawan kolonialisme. Tanggung jawab untuk



Gambar 1. Monumen Peringatan Kematian Kontrolir J.P. De Kat Angelino
Sumber: Dokumentasi Pribadi

perawatan tugu itu sempat dipegang oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli sejak 1996 ketika ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah provinsi Sulawesi Tengah. Hingga kini, tugu tersebut masih berdiri meski dengan kondisi yang tidak cukup terawat.

Pelestarian memori tentang perlawanan rakyat Salumpaga 1919 juga dilakukan melalui sejumlah cara. Di akhir 1960-an hingga 1980-an, kisah tentang

²⁵ "Het Toli-Toli Drama," *Bataviaasch nieuwsblad* (Batavia), 21 Juni 1920, Avond Edisi, 1.

²⁶ Buitenzorg, "De Kat Angelino, Saloempagan, 1932," *Koloniale Monumenten*, 13 Mei 2017, <https://kolonialem Monumenten.nl/2017/05/13/de-kat-angelino-saloempagan-1932/>.



Gambar 2. Tugu Perlawanan Rakyat Salumpaga
Sumber: Dokumentasi pribadi

peristiwa ini mulai muncul dalam sejumlah buku.²⁷ Cerita-cerita tentang perlawanan rakyat juga menjadi tradisi lisan yang dituturkan dari satu generasi ke generasi yang lain. Baik orang tua maupun pemuda di Salumpaga masih cukup fasih jika diminta berbicara tentang peristiwa tersebut.²⁸

Nama Haji Hayun, seorang tokoh yang dianggap paling mewakili peristiwa tersebut, diabadikan melalui beberapa tempat publik. Namanya disematkan di nama jalan, alun-alun di pusat kota Tolitoli, monumen, hingga nama yayasan atau organisasi. Nama sosok ini tidak hanya dikenal di Tolitoli saja; nama Haji Hayun cukup familiar bagi masyarakat Sulawesi Tengah meskipun belum tentu tahu siapa

sebenarnya tokoh ini dan mengapa figur tersebut dijadikan nama salah satu jalan paling ramai di pusat Kota Palu.

Berbagai ritual dan acara juga dilaksanakan oleh masyarakat Salumpaga untuk mengenang peristiwa perlawanan leluhur mereka. Setiap 5 Juni, masyarakat Salumpaga mengadakan acara besar yang dirangkaikan dengan tahlilan, pentas drama, pembacaan puisi, dialog publik, dan napak tilas perjuangan rakyat Salumpaga.

Pada 2013 masyarakat Salumpaga sepakat untuk membangun sebuah monumen dengan nama “Monumen Perjuangan Rakyat Tolitoli”. Hal ini merupakan respons terhadap rencana pemerintah kabupaten Tolitoli yang ingin mengubah nama “Lapangan Haji Hayyun” menjadi “Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan” pada 2012. Monumen ini dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar dengan bentuk punden berundak dan terdiri dari 2 kelompok anak tangga, di mana tangga pertama

²⁷ M. Lubis, *Perjuangan Kami Dalam DPRD Kotamadya Manado: Pemberontakan Toli-Toli (3 Kaum S.I. Mati Digantung)* (Manado: Taman Pengajian “Ni’mah,” 1969); Masyuddin Masyhuda dkk., *Sejarah Perlawanan Terhadap Kolonialisme dan Imperialisme di Daerah Sulawesi Tengah*, ed. oleh Richard Zakaria Leirissa dan M. Soenjata, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1982); Nurhayati Nainggolan, *Sejarah Daerah Sulawesi Tengah* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984).

²⁸ Atika, “Pemuda Dan Pewarisan Memori ‘Perlawanan Rakyat Salumpaga 1919,’” *Manaqib: Jurnal Sejarah Peradaban Islam Dan Humaniora* 3, no. 1 (Juni 2024): 75–104, <https://doi.org/10.24239/manaqib.v3i1.4800>.

terdiri dari 5 anak tangga (merujuk pada tanggal peristiwa) dan tangga kedua terdapat 6 anak tangga (merujuk pada bulan Juni), sementara di tengahnya terdapat patung berbentuk parang (merujuk pada senjata yang digunakan untuk membunuh kontrolir) setinggi 19 meter dari permukaan tanah (merujuk pada tahun kejadian 1919). Selain menggunakan dana swadaya, masyarakat Salumpaga juga sempat mengajukan proposal kepada pemerintah provinsi Sulawesi Tengah dan berhasil memperoleh bantuan dengan dana sebesar 25 juta rupiah pada 2014. Pembangunan monumen ini hingga sekarang belum rampung secara total karena pembangunannya sebagian besar bersumber dari dana swadaya yang terbatas.



Gambar 3. Monumen Peringatan Kematian Kontrolir J.P. De Kat Angelino

Sumber: Dokumentasi pribadi

Tempat-tempat fisik atau simbolik yang telah dipaparkan di atas, mulai dari monumen, penamaan jalan, hingga ritual yang digelar secara tahunan merupakan wujud konkret dari apa yang disebut oleh Nora sebagai *sites of memory*.²⁹ Benda-benda ini menjadi titik fokus atau konsentrasi di mana sekelompok masyarakat mempertahankan dan merayakan elemen-elemen dari identitas dan sejarah mereka. Keberadaan tempat dan keberlangsungan ritual tertentu menjadi unsur penting untuk memahami warisan sejarah yang memberikan pengalaman konkret bagi masyarakat untuk terlibat dengan ingatan kolektif mereka. Secara sosiologis, masyarakat Salumpaga menumbuhkan semacam ingatan kolektif yang, selain berakar secara historis, juga tertanam pada konteks sosialnya, di mana ingatan-ingatan individual dibagikan sehingga memiliki wujud sebagai pengalaman dan narasi bersama.³⁰ Pada tataran inilah hubungan antara memori dan identitas saling membentuk dan mewujudkan sebagai realitas sosiologis³¹ yang kadang-kadang tidak selalu selaras dengan realitas historis.

²⁹ Pierre Nora, "Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire," *Representations*, no. 26 (1989): 7–24, JSTOR, <https://doi.org/10.2307/2928520>.

³⁰ Paul Connerton, *How societies remember*, Themes in the social sciences (Cambridge [England] ; New York: Cambridge University Press, 1989).

³¹ Maurice Halbwachs, *The Collective Memory*, 1st ed, Harper Colophon Books ; CN/800 (New York: Harper & Row, 1980).

Bagaimanapun, memori sosial tampaknya merupakan sesuatu yang diskursif. Ini tampak ketika ingatan saling berkontestasi antara satu kelompok dengan kelompok lain. Inilah yang diidentifikasi oleh Lumangino³² dalam tulisannya tentang ingatan atas peristiwa Salumpaga di Tolitoli sebagai upaya mengingat dan melupakan atau “perang tanda” antara masyarakat Salumpaga dan elite penguasa Tolitoli. Namun, bila dicermati secara lebih saksama, tidak keliru untuk mengatakan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah Tolitoli menyangkut sejarah mengenai peristiwa tersebut sebagai praktik melupakan. Akan tetapi, lebih dari itu, kebijakan yang mereka lakukan lebih terlihat sebagai upaya penyangkalan terhadap ingatan dan sejarah, sekalipun tujuan implisitnya dapat dikatakan sebagai upaya menggerus ingatan publik mengenai nilai-nilai heroik Haji Hayun dan masyarakat Salumpaga di Tolitoli.

Penyangkalan

Tak bisa dipungkiri bahwa peristiwa Salumpaga 1919 mengambil bentuk kekerasan berdarah yang memakan korban jiwa. Elite penguasa Tolitoli mengerti betul bahwa salah seorang leluhur mereka terbunuh dalam peristiwa itu. Karena itu, wajar apabila peristiwa tersebut menjadi memori traumatis bagi keluarga dan keturunan para korban. Namun, ketika membicarakan kekerasan, penting untuk berhati-hati dan mencermati bahwa peristiwa Salumpaga merupakan kekerasan yang muncul sebagai akibat dari kekerasan dalam bentuk yang lain, yakni kekerasan terstruktur yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Dalam kasus Salumpaga, kekerasan ini terjadi ketika pemerintah kolonial mewajibkan masyarakat untuk bekerja bahkan di bulan Ramadan ketika masyarakat Salumpaga yang sebagian besar adalah muslim ingin melaksanakan puasa. Kebijakan koersif ini merupakan bentuk nyata dari eksploitasi manusia.

Penyangkalan memori dan makna atas peristiwa Salumpaga mulai tampak setidaknya sejak salah satu keturunan dari klan Bantilan menduduki kursi Bupati Tolitoli. Bupati tersebut merupakan salah satu keturunan dari Moggi Haji Ali, Raja Tolitoli yang turut terbunuh dalam peristiwa Salumpaga 1919. Memori tentang pembunuhan terhadap leluhurnya menubuh (*embodied*) pada dirinya dan keluarganya, sementara sejarah yang direpresentasikan dalam teks-teks bisa menempel sekalipun relatif mudah terlepas (*disembedded*).³³ Boleh jadi, keluarga Bantilan masih menganggap peristiwa Salumpaga 1919 merupakan trauma masa lalu. Pada tingkatan tertentu, posisi penguasa Tolitoli hampir persis dengan Soeharto ketika berupaya untuk mengintervensi ingatan publik mengenai Serangan

³² Lumangino, “Berebut Sejarah di Toli-Toli: Ingatan Atas Peristiwa Salumpaga 1919.”

³³ Budiawan, “When Memory Challenges History: Public Contestation of the Past in Post-Suharto Indonesia,” *Southeast Asian Journal of Social Science* 28, no. 2 (2000): 46; Budiawan, “Titik Simpang dan Titik Temu Antara Sejarah dan Memori: Sebuah Pengantar,” dalam *Sejarah dan Memori: Titik Simpang dan Titik Temu*, ed. oleh Budiawan (Yogyakarta: Ombak, 2013), x–xi.

Oemoem 1 Maret.³⁴ Hanya saja, Soeharto dengan kekuasaan yang dimilikinya hendak mengklaim peristiwa tersebut sebagai bagian dari heroismenya; sementara elite penguasa Tolitoli, alih-alih mengklaim, justru tampak berusaha untuk menyangkal ingatan kolektif masyarakat Tolitoli tentang Haji Hayun yang erat kaitannya dengan peristiwa Salumpaga.

Pada tahun 2000-an awal, wacana untuk mengajukan Haji Hayun sebagai pahlawan nasional mulai menguar. Kala itu Mohammad Ma'ruf Bantilan telah menjabat sebagai Bupati Tolitoli. Bagi beberapa orang, peristiwa Salumpaga sangat potensial untuk membawa Haji Hayun dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Namun, sampai saat ini usulan untuk menilai peran Haji Hayun dalam peristiwa Salumpaga tidak pernah sampai di tingkat pusat karena secara prosedural usulan itu harus melewati persetujuan dari pemerintah kabupaten. Opini yang tersiar adalah bahwa klan Bantilan menolak usulan tersebut.

Kontroversi mengenai monumen Haji Hayun juga sempat menguar di publik. Pada 2008, salah satu jalan besar di pusat kota Tolitoli yang sebelumnya bernama "Jalan Haji Hayun" diganti menjadi "Jalan Mohammad Haji Ali", sementara nama Haji Hayun disematkan ke salah satu jalan kecil dekat pelabuhan. Pada 2012, muncul rencana pemerintah kabupaten untuk mengubah nama alun-alun di pusat kota Tolitoli, dari yang sebelumnya bernama "Lapangan Haji Hayun" diubah menjadi "Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan". Dalam bahasa lokal, Gaukan berarti Raja, sementara Muhammad Bantilan merujuk pada nama seorang yang pernah menjabat sebagai Raja Tolitoli. Sejak 1980-an, alun-alun atau lapangan tersebut telah dikenal sebagai "Lapangan Haji Hayun". Rencana ini ditentang oleh masyarakat Salumpaga dengan cara menginisiasi pembangunan simbol tandingan berupa "Monumen Perjuangan Rakyat Salumpaga" di desa mereka. Rencana perubahan nama alun-alun ini baru terwujud lima tahun setelahnya, yakni pada 10 Desember 2017, tak lama setelah Dewan Adat Tolitoli melantik Bupati Tolitoli, Haji Mohammad Saleh "Alek" Bantilan, sebagai Raja Tolitoli.³⁵ Pemilihan tanggal itu juga bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Kabupaten Tolitoli ke-57. Perubahan nama alun-alun ini diprotes keras oleh masyarakat Salumpaga bersama sejumlah masyarakat Tolitoli dengan cara berdemonstrasi di pusat kota Tolitoli.³⁶ Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Salumpaga (AMS) menganggap bahwa perubahan tersebut mengingkari perjuangan rakyat Salumpaga dalam menentang penjajahan Belanda. Mursidin, seorang pemuda Tolitoli, bahkan menilai bahwa

³⁴ Ahimsa-Putra, "Remembering, Misremembering and Forgetting."

³⁵ Amat Banjir, "Bupati Tolitoli bersikeras ganti nama Lapangan Haji Hayun," Antara News Palu, 6 Desember 2017, <https://sulteng.antaranews.com/berita/38040/bupati-tolitoli-bersikeras-ganti-nama-lapangan-haji-hayun>.

³⁶ Abdee Mari, "Protes Pergantian Nama Lapangan H Hayun, AMS Geruduk DPRD Tolitoli," *KabarSelebes.id*, 5 Desember 2017, <https://www.kabarselebes.id/berita/2017/12/05/protes-pergantian-nama-lapangan-h-hayun-ams-geruduk-dprd-tolitoli/>.

pergantian nama lapangan tersebut merupakan bagian dari politik dinasti yang akan menghilangkan sejarah.³⁷

Tujuh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tolitoli juga menolak usulan tersebut. Salah satunya adalah Andi Syarif, Ketua DPRD Tolitoli dari fraksi Partai Gerindra, yang saat itu menolak usulan tersebut baik atas nama fraksi maupun atas penilaian pribadi. Menurutnya, perubahan nama untuk lapangan tersebut bukan saja menimbulkan keresahan bagi masyarakat Desa Salumpaga, tetapi juga masyarakat lain di wilayah Tolitoli. “Haji Hayun adalah tokoh dan pahlawan yang namanya dikenal secara nasional,” tuturnya, sebagaimana dilaporkan oleh *Antaraneews*, “bahkan di Manado, Sulawesi Utara pun namanya diabadikan.” Ia juga bersaksi bahwa sejak ia kecil, lapangan itu sudah dikenal dengan sebutan lapangan Haji Hayun. Dokumen proyek pembangunan lapangan itu juga menggunakan nama Lapangan Haji Hayun.³⁸

Saleh Bantilan, Bupati Tolitoli saat itu, menjelaskan bahwa pemberian nama Bantilan untuk lapangan tersebut dilakukan atas permintaan dewan pemangku adat Kabupaten Tolitoli. Menanggapi unjuk rasa yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Salumpaga, ia berdalih bahwa lapangan tersebut pada dasarnya belum memiliki nama, sehingga apa yang pemerintah Kabupaten Tolitoli lakukan tidak bisa disebut sebagai perubahan nama. Sebagai raja sekaligus pemilik lahan lapangan itu, ia berpendapat bahwa nama Bantilan sudah sepantasnya diabadikan sebagai nama lapangan di lokasi tersebut—lokasi yang paling sering dijadikan sebagai tempat pelaksanaan hajatan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tolitoli.³⁹ Dalam liputan *Antaraneews*, penjelasan Bantilan semata-mata berfokus pada niat dan kebijakannya sendiri tanpa menyinggung nama Haji Hayun sama sekali. Sekalipun namanya telah berubah, sebagian masyarakat Tolitoli masih menyebut alun-alun itu sebagai “Lapangan Haji Hayun”.

Upaya pengubahan sejumlah situs memori tersebut dapat dimaknai sebagai pelupaan simbolis (*symbolic forgetting*) yang bertujuan untuk memproduksi narasi baru.⁴⁰ Usaha tersebut dilakukan untuk membangun mekanisme penyangkalan memori, dan mungkin pada taraf yang lebih ekstrem bisa berarti penyangkalan dan bahkan penghapusan terhadap sejarah—sekalipun hal ini sulit untuk terwujud mengingat narasi dan memori tentang peristiwa Salumpaga masih sangat dominan di kalangan masyarakat Tolitoli.

Di samping itu, Lumangino juga mencatat bahwa ada stigmatisasi yang dilakukan oleh elite penguasa Tolitoli terhadap masyarakat Salumpaga. Ia

³⁷ Mohammad, “Mursidin Kritik Pergantian Nama Lapangan Di Toli- Toli,” *Alkhairaat Online*, 9 Desember 2017, <https://alkhairsaat.com/mursidin-kritik-pergantian-nama-lapangan-di-toli-toli/>.

³⁸ Banjir, “Bupati Tolitoli bersikeras ganti nama Lapangan Haji Hayun.”

³⁹ Banjir.

⁴⁰ Lihat, misalnya, Zvika Orr dan Daphna Golan, “Human rights NGOs in Israel: collective memory and denial,” *The International Journal of Human Rights* 18, no. 1 (Januari 2014): 70–71, <https://doi.org/10.1080/13642987.2013.871529>.

mendapati bahwa ungkapan “Orang Salumpaga” seakan menjadi contoh konkret dari perilaku “tidak baik” di Tolitoli. Di kalangan tertentu, ungkapan ini telah menjadi umpatan. Ada kesan bahwa elite penguasa Tolitoli relatif berhasil membentuk citra masyarakat Salumpaga sebagai kelompok yang suka berkelahi dan “pemberontak yang sulit diatur”.⁴¹ Alasan dan narasi-narasi ini menjadi pembicaraan di masyarakat ketika ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tinggal di Salumpaga dimutasi ke tempat yang jauh dari tempat tinggalnya. Meskipun citra ini telah dibentuk, masyarakat Salumpaga sampai hari ini masih tetap melestarikan ingatan mereka sebagai bagian dari perlawanan terhadap Belanda. Identitas ini bagaimanapun selalu dibanggakan sekalipun terkadang diungkapkan secara sungkan dan hati-hati terutama terhadap pihak-pihak “baru”. Bagi Lumangino, upaya saling mereduksi ingatan di masa pascakolonial antara kedua belah pihak merupakan bukti jelas bahwa kedua pihak adalah korban ideologisasi dan kanonisasi Sejarah Nasional Indonesia. Di sisi lain, fenomena di mana segelintir elite lama yang berhadapan dan berpolemik dengan kelompok masyarakat yang berada di bawah naungannya juga menunjukkan contoh konkret betapa rentannya nilai-nilai kewargaan Indonesia pascakolonial,⁴² yang bisa jadi disebabkan oleh tidak adanya perubahan sosial maupun kultural yang terjadi secara mendasar dalam realitas psikologis di kedua belah pihak.

PENUTUP

Artikel ini menunjukkan bahwa isu tentang memori—beserta makna dan nilai yang melekat di dalamnya—mengenai peristiwa Salumpaga 1919 di Tolitoli tidak hanya terbatas pada usaha mengingat dan melupakan saja, tetapi juga melibatkan usaha penyangkalan. Jika proses mengingat dan melupakan terjadi di kedua belah pihak, maka penyangkalan ini hanya terjadi di satu pihak, yakni mereka yang menjadi korban dalam peristiwa Salumpaga 1919. Penyangkalan tersebut mulai tampak setidaknya sejak keturunan korban memegang otoritas politik lokal yang memungkinkan mereka untuk merombak ingatan publik yang terkait dengan peristiwa Salumpaga. Upaya itu merupakan usaha untuk meredam atau menekan ingatan mereka mengenai peristiwa tersebut, yang merupakan bentuk konkret atas penyangkalan itu sendiri.

Satu hal yang penting juga untuk diakui adalah bahwa penyangkalan tersebut didorong oleh perasaan traumatik atas kekerasan masa lalu, terlepas dari adanya kekerasan yang mendahului dan menjadi sebabnya. Seperti yang telah ditegaskan di atas, kekerasan dalam bentuk apapun, baik secara simbolik maupun fisik, merupakan momok bagi mereka yang mengalaminya dan karena itu enggan untuk mengingatnya. Di sisi lain, agaknya tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa

⁴¹ Lumangino, “Berebut Sejarah di Toli-Toli: Ingatan Atas Peristiwa Salumpaga 1919,” 323.

⁴² Gerry van Klinken, *Kewargaan Pascakolonial di Indonesia: Sebuah Sejarah Populer*, trans. oleh Fadjar I. Thufail dan Atka Savitri (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2023).

penyangkalan tersebut mencerminkan kecemasan para korban, yang dalam konteks ini berada dalam posisi dilema historis, sehingga membuat mereka rentan untuk merasa bersalah atau ketakutan dianggap bersalah di tengah-tengah situasi politik Indonesia pascakolonial.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahimsa-Putra, Heddy Shri. "Remembering, Misremembering and Forgetting: The Struggle over 'Serangan Oemoem 1 Maret 1949' in Yogyakarta, Indonesia." *Asian Journal of Social Science* 29, no. 3 (2001): 471–94.
- Atika. "Pemuda Dan Pewarisan Memori 'Perlawanan Rakyat Salumpaga 1919.'" *Manaqib: Jurnal Sejarah Peradaban Islam Dan Humaniora* 3, no. 1 (Juni 2024): 75–104. <https://doi.org/10.24239/manaqib.v3i1.4800>.
- Banjir, Amat. "Bupati Tolitoli bersikeras ganti nama Lapangan Haji Hayun." *Antara News Palu*, 6 Desember 2017. <https://sulteng.antaranews.com/berita/38040/bupati-tolitoli-bersikeras-ganti-nama-lapangan-haji-hayun>.
- Bataviaasch nieuwsblad* (Batavia). "Het Toli-Toli Drama." 21 Juni 1920. Avond Edisi.
- BBC Indonesia. "Penulisan ulang sejarah Indonesia – Rawan dijadikan alat legitimasi hingga meminggirkan peran perempuan dan sejarah Papua." *BBC News Indonesia*, 14 Mei 2025. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1j5l41nlywo>.
- Budiawan. "Titik Simpang dan Titik Temu Antara Sejarah dan Memori: Sebuah Pengantar." Dalam *Sejarah dan Memori: Titik Simpang dan Titik Temu*, disunting oleh Budiawan, vii–xxv. Yogyakarta: Ombak, 2013.
- . "When Memory Challenges History: Public Contestation of the Past in Post-Suharto Indonesia." *Southeast Asian Journal of Social Science* 28, no. 2 (2000): 35–57.
- Buitenzorg. "De Kat Angelino, Saloempagan, 1932." *Koloniale Monumenten*, 13 Mei 2017. <https://kolonialemonumenten.nl/2017/05/13/de-kat-angelino-saloempagan-1932/>.
- Connerton, Paul. *How societies remember*. Themes in the social sciences. Cambridge [England] ; New York: Cambridge University Press, 1989.
- De Preanger-bode* (Bandoeng). "Het gebeurde te Toli-Toli." 12 Agustus 1919. Avond Edisi.
- . (Bandoeng). "Toli-Toli." 23 Juni 1920. Ochtend Edisi.
- Deli courant* (Medan). "De ware schuldigen." 18 September 1919. Dag Edisi.

- Halbwachs, Maurice. *The Collective Memory*. 1st ed. Harper Colophon Books ; CN/800. New York: Harper & Row, 1980.
- Hartono, Rudi. "Pemberontakan Rakyat Toli-Toli 1919." *Headlines. Berdikari Online*, 1 Desember 2013.
<https://www.berdikarionline.com/pemberontakan-rakyat-toli-toli-1919/>.
- Kahin, George McTurnan. *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press, 2007.
- Klinken, Gerry van. *Kewargaan Pascakolonial di Indonesia: Sebuah Sejarah Populer*. Diterjemahkan oleh Fadjar I. Thufail dan Atka Savitri. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2023.
- Latief, Juraid Abdul. "Pemberontakan Petani Toli-Toli 1919." Tesis, Universitas Gadjah Mada, 1996.
- Leidse Courant*. "het aanzien van nederlands indie." 2 September 1978.
- Leksana, Grace. "Pendahuluan: Mengapa Mengingat Kekerasan?" Dalam *Memori-memori Kekerasan: Ketegangan, Identitas, dan Nasionalisme*, disunting oleh Grace Leksana, Arif Subekti, dan Nanda Meiji, 1–12. Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2025.
- Lipstadt, Deborah E. *Denying the Holocaust: The Growing Assault on Truth and Memory*. 1. Plume print. A Plume Book. New York: Plume, 1994.
- Lubis, M. *Perjuangan Kami Dalam DPRD Kotamadya Manado: Pemberontakan Toli-Toli (3 Kaum S.I. Mati Digantung)*. Manado: Taman Pengajian "Ni'mah," 1969.
- Lumangino, Wilman Darsono. "Berebut Sejarah di Toli-Toli: Ingatan Atas Peristiwa Salumpaga 1919." *Perkembangan Mutakhir Historiografi Indonesia: Orientasi Tema dan Perspektif*, Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, November 2015, 311–26.
- Margana, Sri. "Outsiders and Stigma: Reconstruction of Local Identity in Banyuwangi." Dalam *Sites, Bodies and Stories: Imagining Indonesian History*, disunting oleh Susan Legêne, Bambang Purwanto, dan Henk Schulte Nordholt, 218–31. Singapore: NUS Press, 2015.
https://www.academia.edu/43370616/Outsiders_and_Stigma_Reconstruction_of_Local_Identity_in_Banyuwangi.
- Mari, Abdee. "Protes Pergantian Nama Lapangan H Hayun, AMS Geruduk DPRD Tolitoli." *KabarSelebes.id*, 5 Desember 2017.
<https://www.kabarselebes.id/berita/2017/12/05/protes-pergantian-nama-lapangan-h-hayun-ams-geruduk-dprd-tolitoli/>.
- Masyhuda, Masyuddin, Nurhayati Nainggolan, Zohra Mahmud, dan Daeng Patiro Laintagoa. *Sejarah Perlawanan Terhadap Kolonialisme dan Imperialisme di Daerah Sulawesi Tengah*. Disunting oleh Richard Zakaria Leirissa dan M.

- Soenjata. *Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1982.
- McVey, Ruth Thomas. *The rise of Indonesian communism*. 1st Equinox ed. Jakarta: Equinox Pub, 2006.
- Mohammad. "Mursidin Kritik Pergantian Nama Lapangan Di Toli- Toli." *Alkhairaat Online*, 9 Desember 2017. <https://alkhairaat.com/mursidin-kritik-pergantian-nama-lapangan-di-toli-toli/>.
- Nadjamuddin, Lukman. "Perlawanan Rakyat Salumpaga Terhadap Belanda." Skripsi, Universitas Tadulako, 1991.
- Nainggolan, Nurhayati. *Sejarah Daerah Sulawesi Tengah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984.
- Niel, Robert van. *Munculnya Elit Modern Indonesia*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 2009.
- Nora, Pierre. "Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire." *Representations*, no. 26 (1989): 7–24. JSTOR. <https://doi.org/10.2307/2928520>.
- Nordholt, Henk Schulte, Bambang Purwanto, dan Ratna Saptari. "Memikir ulang historiografi Indonesia." Dalam *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*, disunting oleh Henk Schulte Nordholt, Bambang Purwanto, dan Ratna Saptari, 1–32. Jakarta; Denpasar: Yayasan Obor Indonesia, KITLV-Jakarta, Pustaka Larasan, 2008.
- Orr, Zvika, dan Daphna Golan. "Human rights NGOs in Israel: collective memory and denial." *The International Journal of Human Rights* 18, no. 1 (Januari 2014): 68–93. <https://doi.org/10.1080/13642987.2013.871529>.
- Otgaar, Henry, Mark L. Howe, Ivan Mangiulli, dan Charlotte Bücken. "The impact of false denials on forgetting and false memory." *Cognition* 202 (September 2020): 104322. <https://doi.org/10.1016/j.cognition.2020.104322>.
- Otgaar, Henry, Tameka Romeo, Niki Ramakers, dan Mark L. Howe. "Forgetting having denied: The 'amnesic' consequences of denial." *Memory & Cognition* 46, no. 4 (2018): 520–29. <https://doi.org/10.3758/s13421-017-0781-5>.
- Pamungkas, M. Fazil. "Abdoel Moeis, Pembakar Semangat Rakyat Minang." *Historia.ID*, 10 Agustus 2020. <https://www.historia.id/article/abdoel-moeis-pembakar-semangat-rakyat-minang-p7ebq>.
- Purwanto, Bambang. *Gagalnya Historiografi Indonesiasentris?!* Disunting oleh M. Nursam. Yogyakarta: Ombak, 2006.
- Rahmitasari, Hayu, Nurul Fitri Ramadhani, dan Robby Irfany Maqoma. "Fadli Zon menyangkal pemerkosaan massal 1998: Revisi sejarah picu kemarahan

publik." The Conversation, 18 Juni 2025.
<https://doi.org/10.64628/AAN.ngxfnhdf5>.

Ricklefs, Merle Calvin. *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008*. Jakarta: Penerbit Serambi, 2008.

Shiraishi, Takashi. *Dunia Hantu Digul: Pemolisian sebagai Strategi Politik di Indonesia Masa Kolonial, 1926-1941*. Cetakan pertama. Diterjemahkan oleh Jafar Suryomenggolo. Yogyakarta: INSISTPress, 2023.

———. *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*. Diterjemahkan oleh Hilmar Farid. Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2023.

Stanley, Jason. *Erasing History: How Fascists Rewrite the Past to Control the Future*. Atria/One Signal Publishers, 2024.

Vickers, Adrian. *A history of modern Indonesia*. Second edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

Vilosa, Oriza. "Sarekat Islam Toli-Toli tahun 1916-1919." Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 2009.